

TRANSFORMASI *HYDRO-HEGEMONY* CINA DARI NEGATIF MENUJU POSITIVE LEADERSHIP DALAM KERJA SAMA PENGELOLAAN SUNGAI LANCANG-MEKONG

Septiana Puji Rizka Lestari¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia,

ABSTRACT

Problems related to water resources that are transnational in nature are the object of study in International Relations studies. Which was widely studied in the era of the industrial revolution. The problem of cross-border water resources is usually based on the desire of every sovereign country to maximize the use of rivers that cross its country in order to meet the demands of meeting the needs of its country, as happened with the Mekong River. Several studies examining water politics in the river argue that the conflict occurred because the river area is very strategic and rich in resources. In addition, the conflict on this river also occurred because of the increasing asymmetry of power between China and the downstream Mekong countries. However, in recent years, China has shown a more positive and collaborative approach and is actively involved in ensuring justice in the management of the Lancang-Mekong river through a cooperation framework called Lancang-Mekong Cooperation (LMC). Therefore, this research focuses on looking at the reasons why China carried out a hydro hegemonic transformation in the Lancang-Mekong river management cooperation. The author uses the perspective of Rational Choice Theory from Graham T. Allison and Hydro hegemony Theory from Mark Zeitoun and Jeroen Warner as the basis of thought. This research is a qualitative descriptive analytic in nature where the writer tries to generalize the concept with the findings of the data in this study.

Keywords: *China, Hydro-Hegemony, Mekong River, Rational Choice Theory.*

ABSTRAK

Permasalahan terkait mengenai sumber daya air yang bersifat lintas negara menjadi objek kajian studi Hubungan Internasional. yang banyak di teliti pada era revolusi industry. Problematika akan sumber daya air lintas batas negara biasanya didasari oleh keinginan setiap negara yang berdaulat akan pemanfaatan sungai yang melintasi negaranya dengan maksimal demi memenuhi kebutuhan dalam tuntutan pencapaian kebutuhan negaranya seperti yang terjadi pada Sungai Mekong. Beberapa studi yang meneliti politik air di sungai tersebut berpendapat bahwa konflik terjadi karena kawasan sungai yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya. Selain itu konflik di sungai ini juga terjadi karena meningkatnya asimetri kekuasaan Cina dengan negara-negara hilir Mekong. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah menunjukkan pendekatan yang lebih positif dan kolaboratif serta terlibat aktif dalam menjamin keadilan pada pengelolaan sungai Lancang-Mekong melalui kerangka kerjasama yang bernama Lancang-Mekong Cooperation (LMC). Oleh karena itu penelitian ini berfokus untuk melihat alasan mengapa Cina melakukan transformasi hidro hegemoni dalam kerjasama pengelolaan sungai Lancang-Mekong. Penulis menggunakan persepektif Teori Pilihan Rasional dari Graham T. Allison dan Teori Hidro hegemoni dari Mark Zeitoun dan Jeroen Warner sebagai landasan pemikiran. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dimana penulis berusaha untuk menggeneralisasi konsep dengan temuan data pada penelitian ini.

Kata Kunci: Cina, Hydro-Hegemony, Sungai Mekong, Teori Pilihan Rasional

PENDAHULUAN

Sungai Mekong menjadi salah satu bagian dari konflik air internasional di kawasan Asia. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di kawasan Indocina. Memiliki panjang 4.909

km dan merupakan sungai terpanjang ke-12 dan terbesar ke-10 di dunia (Erawati, 2021). Hulu sungai Mekong berasal dari pegunungan Jifu yang menjadi wilayah administrasi Tibet. Mata air tersebut kemudian menjadi sebuah aliran sungai yang sangat besar dan panjang yang mengalir di daratan Cina hingga sebagian negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Dalam bahasa Mandarin sungai Mekong dikenal dengan nama “Lancang Jiang” (Indrayani, Zulkarnain, and Erawati 2021).

Kawasan Lancang-Mekong merupakan pertemuan antara berbagai negara dengan kepentingan geopolitik yang beragam. Cina sebagai negara asal sungai ini, memiliki kepentingan strategis besar di kawasan ini. Amerika Serikat (AS) yang merupakan pihak luar karena tidak menjadi riparian Mekong bahkan dapat menjadi pengelola di kawasan ini. Keterlibatan AS pada kawasan ini telah dimulai sejak pemerintahan Obama. (Amano 2021) upaya yang dilakukan AS untuk memperkuat kedudukannya di kawasan Lancang-Mekong ialah dengan membentuk Lower Mekong Initiative (LMI) pada tahun 2009. Melalui LMI AS banyak terlibat untuk mengurus pengelolaan sungai Mekong di bagian hilir (Souvannaseng, 2022).

Pengembangan konflik pada sungai Lancang-Mekong kemudian dimulai pada abad ke-19 ketika beberapa negara di Asia Tenggara mulai mengembangkan wilayahnya di sepanjang Sungai Mekong (Biba, 2018). Pada tahun 2003 dan 2010 Cina diketahui membangun bendungan berskala besar yang bernama bendungan Xiaowan dan bendungan Jinghong. Bendungan ini dibangun tanpa berkonsultasi dengan negara-negara riparian di Asia Tenggara. Aliran debit air yang berkurang pada kawasan hilir dampak dari pembangunan bendungan yang dilakukan Cina pada kawasan hulu Sungai Lancang-Mekong menyebabkan kerugian vital bagi negara hilir. Sebagai salah satu pengelola sungai Mekong Amerika Serikat mengkritik tindakan Cina dengan menerbitkan rincian data permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangunan bendungan secara besar-besaran di kawasan hulu sungai. Akan tetapi Cina mengabaikan setiap protes yang dilayangkan oleh Negara-negara hilir.

Selama beberapa tahun terakhir Cina terus bersikap tidak peduli pada permasalahan yang ditimbulkan bagi negara-negara hilir. Akan tetapi pada tahun 2016 Cina berbalik arah dengan turut menjadi anggota LMC (Lancang-Mekong Cooperation) yang digagas oleh Thailand. Melalui LMC, Cina turut berpartisipasi dalam menjamin keadilan pembagian wilayah Sungai Mekong (Po and Primiano, 2021). LMC sendiri merupakan mekanisme kerja sama regional yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan dari negara-negara riparian Mekong. Melalui LMC, Cina diketahui telah memprakarsai ratusan proyek kerja sama kecil maupun menengah dari puluhan proyek infrastruktur dan pengembangan industri di wilayah Mekong (Sovachana and Murg, 2019). Menurut Sebastian Biba, perubahan sikap Cina pada permasalahan Sungai Mekong adalah bentuk perubahan dari *negative-leadership hegemonic* menuju ke arah *positif-leadership hegemonic* (Biba, 2021). Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai factor eksternal maupun internal.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji literatur yang terkait dengan suatu topik yang diteliti. Tinjauan literatur yang **pertama** ialah artikel jurnal yang berjudul “*Hegemony Cina in Mekong Region: Room for improvement*” oleh Sebastian Biba yang dipublikasikan di Journal of Southeast Asian Studies pada tahun 2021. Jurnal ini membahas terkait implikasi dari meningkatnya pengaruh ekonomi dan politik Cina di wilayah Sungai Mekong. Studi ini berfokus pada kepemimpinan

hegemonik Cina di kawasan dan dampaknya terhadap negara-negara lain di kawasan tersebut. Literatur ini selanjutnya menganalisis dampak dominasi kepemimpinan Cina di wilayah Sungai Lancang-Mekong, menyoroti cara-cara di mana Cina telah merongrong kedaulatan negara lain dan mengabaikan hak asasi manusia orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Biba juga mencatat bahwa tindakan Cina di wilayah tersebut telah menyebabkan perselisihan atas pembangunan bendungan di Sungai Mekong dan menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari proyek tersebut (Souvannaseng, 2021).

Literatur yang **kedua** ialah artikel yang berjudul "*Cina's "Old" and "New" Mekong River Politics: The Lancang-Mekong Cooperation from a Comparative Benefit-Sharing Perspective*" adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Sebastian Biba diterbitkan dalam jurnal *Water International* pada tahun 2016. Literatur ini berkaitan dengan kebijakan Cina terhadap Sungai Mekong dan bagaimana hal ini mempengaruhi kooperasi antar negara di kawasan tersebut. Sebastian Biba mengkaji tentang kebijakan Cina terhadap Sungai Mekong dengan menggunakan pendekatan analisis peran negara dan teori manfaat bersama. Menurutnya, Cina memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Sungai Mekong, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya terkait dengan pengelolaan air di kawasan tersebut. Literatur ini menyimpulkan bahwa kebijakan Cina di sekitar Sungai Mekong masih cenderung bersifat kolonialistik dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip manfaat bersama (Biba, 2018).

Tinjauan literatur yang **ketiga** ialah artikel yang berjudul "*Power Asymmetry in the Mekong River Basin: The Impact of Hydro-Hegemony on Sharing Transboundary Water*" adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Marlen Rein diterbitkan dalam jurnal *Water International* pada tahun 2017. Menurut Rein, terdapat asimetri kekuatan di sekitar Sungai Mekong, di mana Cina memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Asimetri kekuatan ini dapat mempengaruhi pembagian sumber daya air di sekitar Sungai Mekong, di mana Cina dapat mengontrol aliran air Sungai Mekong sesuai kepentingannya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan konflik antar Negara di kawasan tersebut dan mengancam stabilitas hubungan internasional di kawasan tersebut. Literatur ini menyimpulkan bahwa asimetri kekuatan di sekitar Sungai Mekong dapat mempengaruhi pembagian sumber daya air di kawasan tersebut dan mengancam stabilitas hubungan internasional di kawasan tersebut (Rein, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Norman Denzin menganggap penelitian kualitatif sebagai proses interpretatif yang membawa pemahaman yang lebih dalam tentang dunia sosial, dengan penekanan pada konteks, makna, dan perspektif subjektif (Lincoln, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dan pendekatan deskriptif analisis untuk mencocokkan realita empirik dengan teori yang ada, dengan tujuan untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang sudah terkumpul. Peneliti tidak hanya berusaha untuk memperoleh data melalui berbagai sumber yang ada, tetapi juga melakukan analisa mengenai data yang diperoleh serta mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil data yang sudah dianalisis tadi. Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak hanya memaparkan data-data fenomena yang telah didapatkan akan tetapi juga menganalisis mengapa Cina melakukan transformasi hydro hegemoni dalam kerja sama pengelolaan Sungai Lancang-Mekong melalui analisis teori pilihan rasional oleh Graham T. Allison.

KERANGKA PEMIKIRAN

TEORI PILIHAN RASIONAL

Teori pilihan rasional atau dikenal juga dengan nama teori aktor-sistem merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Graham T. Allison dalam bukunya yang berjudul "Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis" pada tahun 1971. Teori pilihan rasional adalah suatu pendekatan dalam ilmu politik yang menekankan pada analisis rasional dan logis dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh aktor (negara) dalam situasi-situasi politik. (Yulivan 2020) Dalam teori pilihan rasional Graham Allison ada beberapa tahapan rasionalitas untuk memutuskan kebijakan di antaranya ialah mengidentifikasi masalah, menguraikan tujuan, mengidentifikasi dan memeringkatkan hasil pilihan untuk situasi tertentu. Selanjutnya mengumpulkan informasi tentang masalah dan menentukan opsi-opsi apa yang mungkin tersedia untuk mencapai tujuan. Kemudian berbagai alternatif dievaluasi. (Zerbe 2021)

Berdasarkan pemaparan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap Cina di kawasan Sungai Mekong yang telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, dari pendekatan dominasi kepemimpinan negatif menuju lebih positif didasarkan oleh pilihan rasional yang didasarkan pada kalkulasi keuntungan dan kerugian yang akan diterima. Di masa lalu, tindakan Cina di kawasan sering dianggap tegas dan mengintimidasi, dan dikritik karena mengabaikan kepentingan negara lain di kawasan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah mengubah pendekatannya menjadi lebih kooperatif, yang sejalan dengan teori pilihan rasional. (Biba 2016)

HYDRO HEGEMONY

Hydro Hegemony adalah konsep yang merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara atau kelompok negara untuk mengontrol atau mempengaruhi aliran air di suatu wilayah. (Menga 2016) Konsep ini seringkali digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara atau kelompok negara dapat menggunakan sumber daya air sebagai alat untuk mempengaruhi atau mengontrol negara lain (Vij, Warner, and Barua 2020). Hydro hegemony bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti pembangunan bendungan atau proyek-proyek pengelolaan air lainnya yang mengontrol aliran air di suatu wilayah, atau dengan mempengaruhi kebijakan pengelolaan air di negara lain melalui diplomasi atau kekuatan ekonomi (Asmarani, 2019).

Secara keseluruhan, konsep hydro hegemony menjelaskan bagaimana kekuasaan air dapat mempengaruhi kekuasaan negara di dunia internasional dan bagaimana negara yang memiliki sumber air yang mencukupi dapat mengendalikan negara-negara yang memiliki kekurangan air. (Zeitoun and Warner 2006) Dalam konteks transformasi Hydro-Hegemony Cina dalam kerja sama pengelolaan Sungai Lancang-Mekong, konsep hydro-hegemony dapat menganalisis tindakan Cina yang membangun bendungan-bendungan di Sungai Mekong tanpa berkonsultasi dengan negara-negara riparian di Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DINAMIKA PENGELOLAAN DAN PENGATURAN SUNGAI LANCANG-MEKONG

Dalam pengelolaan sungai Lancang Mekong telah dibentuk berbagai perjanjian dan organisasi regional untuk menjamin kemarataan pengelolaan. Adapun beberapa organisasi yang terbentuk diantaranya Great Mekong Subregion (GMS), Mekong River Commission (MRC), dan Lancang Mekong Cooperation (LMC), Lower Mekong Initiative (LMI). Uniknya dalam kerangka kerja sama yang terbentuk di kawasan Lancang-Mekong negara yang bukan riparian dapat turut menjadi anggota pengelola seperti AS (Souvannaseng, 2021).

Melalui organisasi ini negara riparian Mekong membentuk kerangka kerja sama dalam pengelolaan serta pemeliharaan sumber daya air Sungai Lancang-Mekong.

Keterlibatan Amerika Serikat di Kawasan Sungai Lancang Mekong

Amerika Serikat (AS) telah aktif terlibat dalam kawasan Sungai Lancang-Mekong sejak tahun 2009. Keterlibatan AS di kawasan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain mempromosikan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan, serta meningkatkan perdagangan dan investasi di antara negara-negara tersebut. Salah satu upaya AS dalam membentuk kerja sama di kawasan Sungai Lancang Mekong adalah melalui Lower Mekong Initiative (LMI) yang didirikan pada tahun 2009 (US Department of State, 2020).

Melalui LMI AS bertujuan untuk memperkuat kerja sama regional dalam berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keamanan manusia. AS juga mempromosikan investasi sektor swasta, pengembangan teknologi energi bersih, dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan akses energi yang berkelanjutan di kawasan tersebut melalui Asia EDGE (Zeitoun and Warner, 2006).

Negative-Leadership Hegemony Menuju Positive-Leadership Hegemony

Dalam konsep Hydro-Hegemony Zeitoun memperkenalkan dua bentuk penguasaan sumber daya air yakni *Negative-Leadership Hegemony* dan *Positive-Leadership Hegemony* yang merupakan dua mode umum control hidro-hegemoni. Salah satunya adalah control bersama, yang kooperatif sehubungan dengan interaksi riparian dan karenanya menunjukkan hegemoni positif. Sedangkan control yang lebih terkonsolidasi dengan mode intraksi riparian yang kompetitif condong ke bentuk hegemoni negative (Biba, 2021).

Negative-Leadership Hegemony mengacu pada dominasi kepemimpinan yang mengarah pada ketidaksetaraan yang terus tumbuh yang mendukung hak air yang kuat di atas yang lemah. Sedangkan *Positive-Leadership Hegemony* mengacu pada dominasi kepemimpinan yang mengarah pada pemerataan, penyediaan barang public seperti ketertiban stabilitas dan jaminan air mengalir (Zeitoun and Warner, 2006). Bagaimanapun juga kedua bentuk hegemoni tersebut memiliki tujuan utama yakni hegemon tetap memegang kendali untuk memastikan kepatuhan.

Keterlibatan AS di kawasan Sungai Lancang Mekong menunjukkan komitmennya dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan stabilitas regional. Melalui berbagai inisiatif dan program, AS berusaha untuk memperkuat kerja sama regional dan mempromosikan investasi sektor swasta serta teknologi yang dapat membantu meningkatkan akses energi dan pembangunan manusia di kawasan ini.

MEMPERLUAS PENGARUH DI KAWASAN INDO-CINA

Transformasi Cina dari negative-hegemonic leadership menuju positif-hegemonic leadership di Kawasan Lancang Mekong dapat berpengaruh signifikan terhadap perluasan pengaruh Cina di kawasan Indo-Cina. Hal ini dikarenakan kawasan Sungai Lancang-Mekong merupakan titik vital di kawasan tersebut. Selain itu aliran Sungai ini juga terhubung dengan Laut Cina Selatan memungkinkan Cina untuk mengintensifkan aktivitas perdagangan maritim dan mengamankan rute pelayaran strategis bagi ekspor dan impor mereka. Perubahan kepemimpinan Cina ke arah kepemimpinan yang positif berdampak pada meningkatnya ketergantungan negara-negara di kawasan Indo-Cina. Ada beberapa faktor yang mendorong Cina untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Cina seperti

ketergantungan Ekonomi, mempromosikan Belt and Road Initiative, keamanan energy dan kepentingan strategis (Sari, 2020).

Memperluas pengaruh pada kawasan Indo-Cina didasari oleh ketergantungan ekonomi. Cina adalah mitra dagang bagi negara-negara Indo-Cina. Dengan memperluas pengaruhnya di kawasan dapat memperkuat ketergantungan ekonomi negara-negara aliran Mekong terhadap Cina. Transformasi Cina juga di tujukan untuk menjamin keberhasilan BRI di kawasan Indo-Cina. Tindakan agresif Cina dalam pengelolaan kerja sama sungai Lancang-Mekong hanya akan memperparah hubungan Cina dengan negara-negara di kawasan tersebut (Van Huy and Yen, 2021).

Sedangkan pada faktor keamanan Cina memandang kawasan Indo-Cina sebagai wilayah yang penting secara strategis karena merupakan jalur transportasi dan penghubung laut yang vital antara Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Laut Cina Selatan (McPherson 2020). Oleh karena itu, Cina ingin memastikan keamanan dan memperluas kehadirannya di wilayah tersebut. Hal ini dapat membantu Cina untuk melindungi kepentingannya. Selain itu sumber daya alam di kawasan Indo-Cina seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya akan menguntungkan Cina jika berhasil mengontrol hal hal tersebut (Kuenzer et al. 2013).

MENGGESER PENGARUH AS DI KAWASAN LANCANG MEKONG

Amerika Serikat diketahui memiliki kerangka kerjasama dengan negara-negara Mekong yang berada di kawasan hilir atau biasa dikenal sebagai lembah Mekong bawah. Kerangka kerjasama ini dikenal sebagai Lower Mekong Initiative (LMI). Kemitraan Mekong-AS mencakup 14 lembaga dan departemen pemerintah AS dengan lebih dari 50 program untuk memperkuat kerja sama guna mengatasi kepentingan bersama dan tantangan bersama (U.S. Department of State 2019). Dari tahun 2009 hingga 2021, pemerintah AS memberikan lebih dari \$4,3 miliar bantuan hibah bilateral dan regional kepada lima negara mitra Mekong, termasuk hampir \$4,0 miliar dari Departemen Luar Negeri, \$1,4 miliar untuk program kesehatan; \$837 juta untuk pertumbuhan ekonomi; \$709 juta untuk perdamaian dan keamanan; \$636 juta untuk hak asasi manusia dan pemerintahan; \$235 juta untuk pendidikan dan layanan sosial; Dan \$165 juta untuk bantuan kemanusiaan. (US Department of State 2020)

Kemitraan Mekong-AS mencakup kerja sama dalam konektivitas ekonomi, keamanan energi dan iklim, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan air lintas batas dan sumber daya alam, dan keamanan non-tradisional. Sektor keamanan non-tradisional terdiri dari kolaborasi pada ancaman yang muncul seperti peningkatan kapasitas keamanan kesehatan dan respons pandemi; melawan kejahatan transnasional; keamanan cyber; dan melawan perdagangan orang, obat-obatan terlarang, kayu, dan satwa liar (Mallick 2022).

Amerika Serikat (AS) telah terlibat lebih dulu dalam menjalin kemitraan dengan negara di kawasan Sungai Lancang-Mekong dibandingkan dengan Cina. Sehingga AS menjadi negara yang paling vocal mengkritik Cina terkait pembangunan bendungan di kawasan hulu Mekong. Selama pemerintahan Trump, AS meningkatkan kritiknya terhadap bendungan Cina dan meningkatkan keterlibatan Amerika di sub wilayah tersebut melalui Kemitraan Mekong-AS (Van Huy and Yen, 2021). Diketahui AS membiayai penelitian untuk membuktikan dampak negatif dari bendungan yang di lakukan oleh Cina (Mallick 2022).

Penelitian yang didanai oleh AS menyimpulkan bahwa bendungan-bendungan Cina menahan air selama kekeringan tahun lalu. Studi oleh Eyes on Earth, sebuah perusahaan penelitian dan konsultan yang berbasis di AS yang berspesialisasi dalam air, membangun

model prediksi berdasarkan pencitraan satelit dan data MRC yang katanya menunjukkan perairan yang hilang di hilir, dimulai sekitar tahun 2010 (Jaknanihan, 2022). Menteri Luar Negeri Mike Pompeo saat itu, mengkritik tajam operasi bendungan hulu Cina dan kurangnya transparansi penggunaan air sungai (Putri 2016).

Pemerintah AS dan Cina masing-masing menyatakan laporan berbeda tentang apakah 11 bendungan Cina di sungai itu merugikan negara-negara di hilir (Mallick 2022). Bendungan-bendungan Cina telah memberinya kontrol ekstensif atas air yang mengalir ke Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, yang telah lama bergantung pada sungai untuk pertanian, perikanan, dan pembangkit listrik tenaga air di Laos. Kendali itu memungkinkan Cina untuk mengatur agenda pembangunan yang terkait dengan jalur air, dan untuk mengecualikan (AS) dari peran setelah beberapa dekade mempromosikan proyek Mekong sebagai cara untuk menggunakan pengaruhnya di wilayah tersebut .

Seorang duta besar AS di kawasan itu menggambarkan Cina sebagai "penimbun" air di 11 bendungannya di bagian atas sungai sepanjang 4.350 km (2.700 mil), merugikan mata pencaharian jutaan orang di negara-negara hilir. Cina juga telah meningkatkan aktivitas Lancang Mekong Cooperation group (LMC), sebuah badan antar pemerintah yang relatif baru yang dikecam oleh duta besar AS karena mencoba untuk "mengesampingkan" Komisi Sungai Mekong (MRC) yang berusia 25 tahun. Chheang, "Environmental And Economic Cooperation In The Mekong Region." Kementerian luar negeri Cina mengatakan kepada Reuters bahwa setiap saran AS bahwa Beijing mencoba mengambil alih percakapan Mekong tidak berdasar.

Cina kemudian membalas hal ini dengan menerbitkan studi terkait dampak positif yang telah dihasilkan oleh bendungan yang dibangunnya. "Bendungan sungai di Cina membantu mengatasi kekeringan di sepanjang Lancang-Mekong, demikian temuan penelitian," surat kabar yang diterbitkan oleh People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis Cina yang berkuasa. Selain itu studi oleh Universitas Tsinghua dan Institut Sumber Daya Air Cina sebenarnya mengatakan bendungan Cina dapat, di masa depan, membantu mengurangi kekeringan. Ha, "Cina's Hydro-Politics Cooperation Through The Lancang-Mekong."

Membantah lebih lanjut terkait tuduhan AS terkait dampak buruk dominasi Cina pada pengelolaan sungai Lancang-Mekong, Cina melalui LMC mengglontorkan jutaan USD untuk membantu pengembangan proyek bendungan Laos dan membantu pembangunan jalur kereta Vietnam. (Vu 2014) Selain itu juga Cina memberikan bantuan terhadap negara-negara riparian Mekong untuk membangun berbagai jenis infrastruktur untuk menunjang kemajuan pada kawasan tersebut. Walaupun negara hilir tidak membela siapapun dalam perselisihan ini, ketergantungan atas bantuan Cina meningkat tajam. Beberapa negara seperti Laos, Kamboja dan Vietnam menjadi negara yang paling bergantung terhadap Cina. Cina perlahan menjadi kawan bagi negara hilir Mekong. Dampak lain dari ini ialah AS tidak bias mengintrupsi lebih jauh terkait dominasi peran dan kebijakan Cina pada kawasan ini (Grünwald 2020).

a. Menginisiasi Terbentuknya LMC

Sebagai inisiatif dari Cina untuk menangkal kehadiran AS di kawasan Mekong dibentuklah LMC. Inisiatif LMC menjadi wujud kepemimpinan positif Cina di kawasan LancangMekong. Kerja sama Lancang-Mekong (LMC) yang didirikan pada tahun 2016 sebagai platform multilateral bagi Cina untuk melibatkan negara-negara hilir dalam pengelolaan sumber daya air Mekong (Bunyavejchewin 2016). LMC dipimpin dan diinvestasikan oleh Beijing. Cina secara aktif memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antara negara-negara anggota LMC, serta memberikan

dukungan keuangan dan teknis untuk proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Mekong (Busbarat 2018).

Melalui LMC, Cina melakukan pergeseran kebijakan menjadi pendekatan keamanan yang komprehensif dan non-tradisional, bahkan kooperatif. Cina menunjukkan perubahan terhadap tata kelola sungai Mekong yang awalnya anti kritik menjadi lebih banyak konsultasi dan koordinasi dengan negara tetangga, dan partisipasi dalam lembaga-lembaga regional yang mengatur pembangunan Mekong (Hirsch 2011).

Upaya-upaya yang telah dilakukan Cina dalam LMC adalah bukti dari perubahan kepemimpinannya kearah yang lebih positif. Hal ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan Cina seperti: *Pertama*, mengedepankan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Cina tidak memaksakan kehendaknya kepada negara-negara anggota LMC, melainkan membangun kerja sama yang didasarkan pada kepentingan bersama dan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan (Bunyavejchewin 2016).

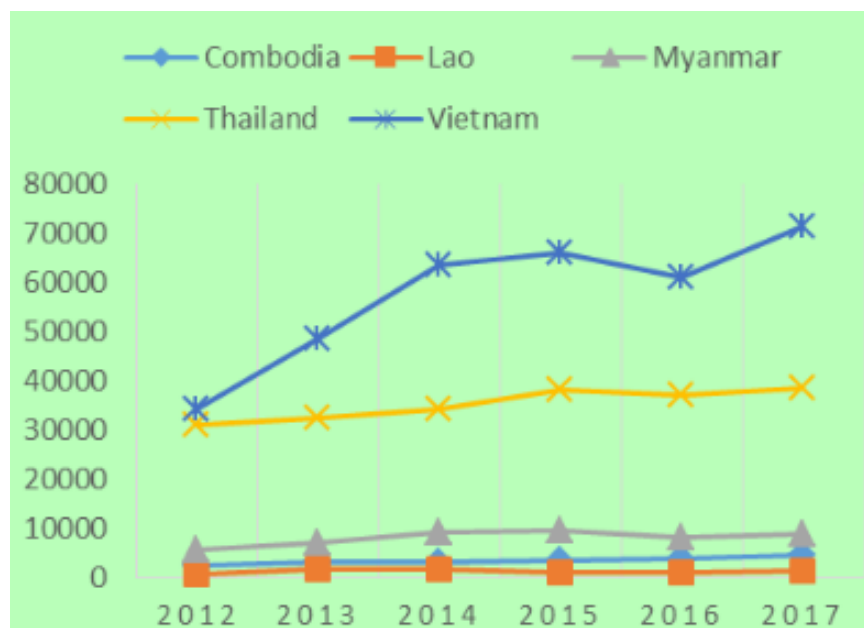
Kedua, Memberikan kontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian kawasan Mekong. Cina menyediakan dukungan keuangan dan teknis untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas negara-negara anggota LMC, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan pembangkit listrik. *Ketiga*, Mengedepankan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan dan lingkungan. Cina mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam proyek-proyek yang dilaksanakan di kawasan Mekong, serta berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan (Bunyavejchewin 2016). Dengan demikian, LMC dapat dianggap sebagai salah satu wujud kepemimpinan positif Cina di kawasan Mekong, yang menunjukkan komitmen Cina untuk membangun kerja sama regional yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

b. Keuntungan Strategis yang di Terima Cina Setelah Terbentuknya LMC

Setelah lima tahun terbentuknya LMC tepatnya pada tahun 2021, output ekonomi Cina meningkat sebesar 47,5 persen, berkontribusi pada pencapaian bersejarah Cina dalam membangun masyarakat yang cukup sejahtera dalam segala hal. PDB gabungan dari lima negara Mekong tumbuh lebih dari 30 persen. Tingkat perkembangan ekonomi dan sosial mereka terus meningkat. Pada tahun 2020, perdagangan antara Cina dan negara-negara Mekong mencapai \$322,1 miliar, naik 66,3 persen dari tahun 2015 (China Embassy 2021).

Cina kini menjadi mitra dagang terbesar Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand, serta mitra dagang terbesar kedua Laos. Vietnam telah menjadi mitra dagang terbesar keempat Cina di antara negara-negara. Terbentuknya LMC menjadikan Cina sebagai mitra dagang yang mendominasi perdagangan regional penyedia input utama untuk negara-negara hilir Mekong, dan importir barang, terutama untuk Laos dan Vietnam (WWF 2016).

Setahun setelah berdirinya LMC tepatnya pada tahun 2017, volume perdagangan impor dan ekspor Cina mencapai rekor tertinggi 399,83 miliar dolar AS di kawasan ASEAN. Sementara itu ekspor Cina ke ASEAN meningkat sebesar 9,6 %, sedangkan impor dari negara lain meningkat 19,4 %. Selain itu pangsa ekspor negara Lancang-Mekong ke pasar Cina juga meningkat (Zhu, Wang, and Zhu 2019).



Sumber: Jing Yizhu, "The Study on the Current Situations, Problems and Countermeasures in Economic and Trade Exchanges Between China and Lancang-Mekong Countries", Atlantis Press, 2019.

Melalui pengamatan grafik diatas yang mencantumkan volume ekspor antara Cina dan negara hilir Mekong yakni Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Myanmar dapat disimpulkan dengan jelas bahwa volume perdagangan menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kuatnya posisi tawar yang dimiliki Cina juga menjadi faktor pendukung berlangsungnya hegemoni dalam pengelolaan sungai Lancang-Mekong. Perubahan kemudian terjadi pada tahun 2016 ketika Cina memutuskan untuk menginisiasi sebuah kerangka kerja sama yang disebut sebagai LMC. Melalui kerangka kerja sama ini Cina mulai beralih dari tata kelola yang tidak menghiraukan negara-negara hilir menjadi merangkul dan mendorong tata kelola yang adil di kawasan Lancang-Mekong.

Menurut Sebastian Biba Cina telah bertransformasi dari negative leadership hegemony menuju positive leadership hegemony yang pada dasarnya perubahan yang dilakukan ditujukan untuk tetap mempertahankan dominasi dalam pengelolaan sungai Lancang-Mekong. Adapun factor lain yang mempengaruhi keputusan Cina untuk beralih kepemimpinan yang lebih positif adalah karena kebutuhan untuk memperluas pengaruh di kawasan indo-Cina dan menggeser pengaruh AS di kawasan sungai Lancang-Mekong.

REFERENCES

- Amano, Kensaku. 2021. "China's Hydro-Hegemony and the United States in the Mekong River Basin." *Academia Letters*. <https://doi.org/10.20935/al4419>.
- Asmarani, Nur. 2019. "Upaya Ethiopia Dalam Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Di Sungai Nil Biru Terhadap Status Quo Mesir Tahun 2015-2018." *Skripsi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Biba, Sebastian. 2016. "From Securitization Moves to Positive Outcomes: The Case of the Spring 2010 Mekong Crisis." *Security Dialogue* 47 (5): 420–39. <https://doi.org/10.1177/0967010616657795>.
- . 2018a. "China's 'Old' and 'New' Mekong River Politics: The Lancang-Mekong

- Cooperation from a Comparative Benefit-Sharing Perspective." *Water International* 43 (5): 622–41. <https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1474610>.
- . 2018b. "China's 'Old' and 'New' Mekong River Politics: The Lancang-Mekong Cooperation from a Comparative Benefit-Sharing Perspective." *Water International* 43 (5): 622–41. <https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1474610>.
- . 2021. "China's Hydro-Hegemony in the Mekong Region: Room for Improvement." *Journal of Southeast Asian Studies*, 215–34. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59361-2_11.
- Bunyavejchewin, Poowin. 2016. "The Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Viewed in Light of the Potential Regional Leader Theory." *Journal of Mekong Societies* 12 (3): 49–64. <https://doi.org/10.14456/jms.2016.24>.
- Busbarat, Pongphisoot. 2018. "Grabbing the Forgotten: China's Leadership Consolidation in Mainland Southeast Asia through the Mekong-Lancang Cooperation." *ISEAS Perspective*, 2018. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_7@50.pdf.
- Chheang, Vannarith. 2010. "Environmental and Economic Cooperation in the Mekong Region." *Asia Europe Journal* 8 (3): 359–68. <https://doi.org/10.1007/s10308-010-0272-9>.
- China Embassy. 2021. "Lancang-Mekong Cooperation: After Five Fruitful Years, A New Journey Awaits — Marking the Fifth Anniversary of the Lancang-Mekong Cooperation." China Embassy. 2021. http://mm.china-embassy.gov.cn/eng/xwdt/202104/t20210414_8906595.htm.
- Grünwald, Richard. 2020. "Lancang-Mekong Cooperation: Present and Future of the Mekong River Basin." *Politické Vedy* 23 (2): 69–97. <https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.2.69-97>.
- Ha, Hoang Thi. 2022. "China's Hydro-Politics Cooperation Through the Lancang-Mekong." *ISEAS YUSOF ISHAK INSTITUTE*.
- Hirsch, Philip. 2011. "China and the Cascading Geopolitics of Lower Mekong." *The Asia Pacific Journal* 9 (20): 1–5. <http://www.chinadialogue.net/article/show/sin>.
- Huy, Duong Van, and Tran Thi Hai Yen. 2021. "Rising Strategic Competition Between the United States and China in Mekong River Subregion." *Journal Global Policy and Governance* 10 (2): 73–100. <https://doi.org/10.14666/2194-7759-10-2-005>.
- Indrayani, Irma, Zulkarnain, and Dinanti Erawati. 2021. "Hegemoni Tiongkok Atas Sungai Mekong Dan Pengaruhnya Terhadap Negara Di Bagian Hilir: Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 42 (1): 89–108. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32912.74242>.
- Jaknanihan, Arrizal Anugerah. 2022. "Minilateralism and Great Power Competition during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Mekong Region." *Journal of Integrative International Relations* 7 (1): 1–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6621336>.
- Kuenzer, Claudia, Ian Campbell, Marthe Roch, Patrick Leinenkugel, Vo Quoc Tuan, and Stefan Dech. 2013. "Understanding the Impact of Hydropower Developments in the Context of Upstream-Downstream Relations in the Mekong River Basin." *Sustainability Science* 8 (4): 565–84. <https://doi.org/10.1007/s11625-012-0195-z>.
- Lincoln, Norman Denzin dan Yvonna. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Edited by Norman Denzin. *Synthese*. Vol. 195. London: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>.
- Mallick, Priyanka. 2022. "Transboundary River Cooperation in Mekong Basin: A Sub-Regional Perspective." *Journal of Asian Security and International Affairs* 9 (1): 50–71. <https://doi.org/10.1177/23477970221076746>.
- McPherson, Malcolm F. 2020. "China's Role in Promoting Transboundary Resource Management in the Greater Mekong Basin (GMB)." *Harvard Business Review*, 2020.
- Menga, Filippo. 2016. "Reconceptualizing Hegemony: The Circle of Hydro-Hegemony." *Water Policy* 18 (2): 401–18. <https://doi.org/10.2166/wp.2015.063>.
- Po, Sovinda, and Christopher B. Primiano. 2021. "Explaining China's Lancang-Mekong Cooperation as an Institutional Balancing Strategy: Dragon Guarding the Water."

- Australian Journal of International Affairs* 75 (3): 323–40.
<https://doi.org/10.1080/10357718.2021.1893266>.
- Putri, Jovita Aditya. 2016. "INSTITUSIONALISASI KERJASAMA AMERIKA SERIKAT - NEGARA LEMBAH BAWAH MELALUI PEMBENTUKAN LOWER MEKONG INITIATIVE 2009-2013." *Journal of International Relations* 2 (4): 110–21.
- Rein, Marlen. 2017. "Power Asymmetry in the Mekong River Basin: The Impact of Hydro-Hegemony on Sharing Transboundary Water." *Vienna Journal of East Asian Studies* 8 (1): 127–62. <https://doi.org/10.2478/vjeas-2016-0005>.
- Sari, Dinda Mei. 2020. "MOTIF TIONGKOK MENINGKATKAN KERJA SAMA DENGAN MEKONG RIVER COMMISSION." *JOM FISIP* 7 (1): 104–16.
- Souvannaseng, Pon. 2021. "The Political Economy of Hydropower in Southwest China and Beyond. International Political Economy Series." In *China's Hydro-Hegemony in the Mekong Region: Room for Improvement*, 255–74. Boston: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-59361-2>.
- . 2022. "Liquidated: US/Japan-Chinese Rivalry, Financial Crises, and Explaining Shifts in Hydropower Finance Regimes in the Mekong." *Asian Perspective* 46 (1): 49–75. <https://doi.org/10.1353/apr.2022.0002>.
- Sovachana, Pou, and Bradley J Murg. 2019. "The Lancang-Mekong Cooperation Mechanism: Confronting New Realities in Cambodia and the Greater Mekong Subregion." <https://about.jstor.org/terms>.
- U.S. Department of State. 2019. "Lower Mekong Initiative." <https://www.state.gov/lower-mekong-initiative/>.
- US Departement of State. 2020. "Lower Mekong Initiative." US Departement of State. 2020. <https://www.state.gov/lower-mekong-initiative/>.
- Vij, Sumit, Jeroen Warner, and Anamika Barua. 2020. "Power in Water Diplomacy." *Water International* 45 (4): 249–53. <https://doi.org/10.1080/02508060.2020.1778833>.
- Vu, Truong-Minh. 2014. "Between System Maker and Privileges Taker: The Role of China in the Greater Mekong Sub-Region TT - Entre Criador Do Sistema e Aproveitador de Privilégios: O Papel Da China Na Sub-Região Do Grande Mekong." *Revista Brasileira de Política Internacional* 57 (spe): 157–73. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292014000300157&lang=pt%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rbpi/v57nspe/0034-7329-rbpi-57-spe-00157.pdf.
- WWF. 2016. "The Role of the Mekong River in the Economy." *WWF Asia and HSBC*.
- Yulivan, Ivan. 2020. *Politik Luar Negeri*. 1st ed. Surabaya: Jakad Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Luar_Negeri/cDhTEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+pilihan+rasional+Graham+T.+Allison&pg=PT146&printsec=frontcover.
- Zeitoun, Mark, and Jeroen Warner. 2006. "Hydro-Hegemony - A Framework for Analysis of Trans-Boundary Water Conflicts." *Water Policy* 8 (5): 435–60. <https://doi.org/10.2166/wp.2006.054>.
- Zerbe, Noah. 2021. "The Rational Actor Model of Foreign Policy Decision Making." Berlin.
- Zhu, Jingyi, Rui Wang, and Li Zhu. 2019. "The Study on the Current Situations, Problems and Countermeasures in Economic and Trade Exchanges Between China and Lancang-Mekong Countries." Vol. 146. Kunming. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200708.063>.